



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 11 April 2017

Halaman: 13

Komunitas Angklung Gelar Unjuk Rasa

● NENI RIDARINENI

YOGYAKARTA — Paguyuban angklung Yogyakarta didampingi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa melakukan aksi unjuk rasa di DPRD DIY. Hal itu terkait dengan adanya surat peringatan pertama dan kedua tentang pelanggaran operasi angklung di DIY.

"Teman-teman dari paguyuban angklung di DIY merupakan pekerja seniman yang menghibur masyarakat terutama yang di perempatan saat lampu merah dan bukan gepeng (gelandangan dan pengemis)," kata Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa Sugiarto saat melakukan orasi di depan Lobby DPRD DIY, Senin (10/4).

Para pemain angklung yang tergabung dalam 15 kelompok/komunitas angklung di Yogyakarta pun mengamininya. "Kami bukan pengemis, kami punya KTP dan kami pe-

laku seni angklung yang bermain di pinggir jalan lampu merah sebagai bentuk aksi pertunjukan seni angklung untuk menghibur masyarakat yang sedang menunggu lampu merah. Para wisatawan justru senang dengan permainan kami," kata salah seorang pemain angklung.

Lebih lanjut, Sugiarto mengatakan seni angklung tidak pernah mengganggu ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki di trotoar. Menurut dia, masih banyak ruang yang tidak terpakai. Lagipula tempat tersebut tidak mereka pakai secara permanen.

Aksi unjuk rasa kemarin diselingi permainan musik angklung. Mereka juga membawa spanduk-spanduk dan poster-poster yang bertuliskan di antaranya 'Angklung Jangan Dibumihanguskan', 'Tolong Jangan Tindas' Kami Seniman, Angklung Jogja', dan 'Angklung Bukan Gepeng'.

Mereka juga mengajukan tiga tuntutan. Yang pertama, Gubernur DIY

dan Satpol PP DIY mencabut surat peringatan pertama dan kedua tentang pelanggaran operasi angklung di DIY. Kedua, menolak keras keras stigma pekerja seni angklung adalah gelandangan dan pengemis. Ketiga, memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku seni angklung DIY.

Pada kesempatan ini mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPRD DIY Darma Setiawan. Dia mengatakan setuju dengan pendapat mereka bahwa komunitas angklung yang bermain di perempatan jalan bukan gepeng.

Menurut dia, fenomena ini muncul karena kurangnya ruang publik di DIY. "Setiap hari saya sering berhenti di perempatan jalan dan melihat pemain angklung tidak mengganggu lalu lintas dan masyarakat. Mereka mengekspresikan seni dan budaya dan ini sudah menjadi ciri khas di Yogyakarta," kata Darma.

Meskipun demikian, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) DIY GBPH Yudaningrat menegaskan tak akan mencabut surat peringatan tentang pelanggaran operasi angklung di DIY tersebut. Menurut dia walaupun merupakan musisi jalanan, pegiat komunitas angklung meminta uang secara cuma-cuma.

"Sehingga tidak berbeda dengan pengemis. Yang jelas (mereka) mengganggu lalu lintas jalan. Pergerakannya sampai di bahu jalan dan meminta uang ke pengendara motor maupun mobil," kata pria yang akrab dipanggil Yuda tersebut.

Karena itulah Yuda menegaskan tidak akan mencabut surat peringatan pertama dan kedua yang sudah disampaikan kepada komunitas angklung. "Kalau saya mencabut surat peringatan tersebut, saya yang kena. Karena tugas Satpol PP itu melakukan penegakan perda. Kami berharap ketika mereka ditempatkan di tempat yang baru, pendapatan mereka akan lebih banyak," ujarnya. ■

Instansi	Nilai Berita	
1. <u>Din. Pariwisata</u>	☐ Negatif	☐ Ame
2.	☐ Positif	☐ Seg
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		☐ Jumpa Pers
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005